

**PENYELESAIAN SENGKETA PERBATASAN LAUT ANTARA PERU DENGAN
CHILE MELALUI MAHKAMAH INTERNASIONAL
TAHUN 2008-2014**

Oleh:

Citra Suryani,

citrasuryani@yahoo.com

Pembimbing: Drs. Idjang Tiarsono, M.Si

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

**Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293- Telp/fax.
0761-63277**

Abstract

This research describes the efforts made in the settlement of the maritime boundary dispute between Peru to Chile. Respective claims began in 1947, in which States claims jurisdiction and exclusive rights to waters along 200 miles of the coast respectively. Then the two countries, Peru and Chile, as well as Ecuador, in the 1950s into a different agreement on maritime zones. Official legal dispute began in 2007 when Peru certify a graph showing that the claimed sea area overlaps with areas claimed by Chile. Negotiations have been conducted by both parties in resolving the problems that occur in the border starting from the 1960s. But efforts to negotiate in terms of determining the maritime boundary between Peru definite and Chile did not succeed, because the two countries have different interpretations of the border. Last negotiation efforts undertaken by Peru expressly rejected by Chile. Peru finally decided to resolve this dispute legally through the International Court of Justice (ICJ).

Keywords: Maritime Dispute, international Treaty, Delimitation, ICJ

Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu sejauh mana upaya yang dilakukan oleh Peru dalam penyelesaian sengketa perbatasan laut dengan Chili, yang telah berlangsung sejak lama. Sengketa merupakan ketidak sepakatan mengenai soal fakta, hukum atau kebijakan dimana klaim atau pernyataan dari satu pihak bertemu dengan penolakan, menuntut balas, atau

penolakan oleh yang lain.¹ Sengketa antara Peru dan Chili dimulai sejak kedua Negara menjadi Negara tetangga setelah Bolivia menyerahkan daerah pesisirnya kepada Chili akibat kekalahan dari Perang Pasifik. Dalam perjanjian Ancon, tahun 1883, Peru juga harus menyerahkan kepemilikan atas

¹Lantang, Imanuella. 2013. *Penerapan Jus Cogens Terhadap Praktik Imunitas Negara (Studi Kasus Putusan Icj Dalam Kasus Jerman Lawan Italia)*. Lex Crimen, 2(1). Hlm. 175. Diakses Dari <[Http://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexcrimen/Article/View/1008/821](http://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Lexcrimen/Article/View/1008/821)> 12/6/14> Pada Tanggal 12/06/14

Provinsi pesisir Tarapaca kepada Chili selama 10 tahun, diikuti oleh plebisit untuk menentukan apakah provinsi ini permanen dibawah pemerintahan Chili atau terus menjadi bagian dari wilayah Peru.²

Setelah lebih dari empat dekade negosiasi yang sulit mengenai Tacna dan Arica, perwakilan dari Peru dan Chile akhirnya menandatangani perjanjian Lima dan protokol tambahan pada tanggal 3 Juni 1929. Perjanjian ini menyelesaikan tentang Tacna dan Arica, dimana Tacna kembali ke Peru sedangkan Arica tetap menjadi bagian Chili. Selain itu, pemerintah Chili setuju untuk memberikan Peru dermaga, kantor bea cukai, dan stasiun kereta api di Teluk Arica serta membayar ganti rugi tunai kepada Peru.³ Sementara garis pemisah antara kedua negara harus dimulai dari titik pantai yang di beri nama Concordia, sepuluh kilometer di sebelah utara jembatan sungai Lluta terus kearah timur sejajar dengan garis bagian Chili dari Arica. Peru menerima kembali Provinsi Tacna pada tanggal 28 Agustus 1929, sebelum proses demarkasidimulai.

Pada tahun 1947 kedua negara secara sepihak mengklaim hak maritim 200 mil sepanjang pantai mereka. Hal ini dipicu oleh Proklamasi Presiden Amerika Serikat, Truman, pada 28 September 1945, yang mengeluarkan pernyataan klaim atas landas kontinen dan menyatakan negara menguasai sumber daya dari lapisan tanah dan dasar laut dibawahnya. Namun perikanan dan sumber daya air tetap tunduk hanya pada peraturan yurisdiksi. Presiden Chili

mengeluarkan Deklarasi tentang klaim negaranya pada 23 Juni 1947, sedangkan Peru mengeluarkan Keputusan Agung Nomor 781 pada 1 Agustus 1947.

Kedua negara juga telah menandatangani berbagai perjanjian mengenai norma kebijakan maritim internasional mereka. Pada tahun 1952 Peru dan Chile, bersama-sama dengan Ekuador, memulai proses kerjasama maritim dengan maksud untuk melindungi laut yang berdekatan dari kegiatan predator armada asing. Deklarasi ini tentang Zona Maritim 18 Agustus 1952 (Deklarasi Santiago). Tiga negara penandatangan sepakat bahwa masing-masing negara mereka memiliki zona maritim tidak kurang dari 200 mil lebar disepanjang pantai mereka.⁴

Perjanjian Zona Batas Maritim Khusus ini di tandatangani oleh Peru, Chili, dan Equador di Lima pada tanggal 4 Desember 1954. Ketiga negara ini mengeluarkan kesepakatan tentang zona perbatasan maritim khusus 10 mil, dimana luasnya pada setiap sisi paralel lintang membentuk batas maritim antara negara masing-masing. Zona dimulai dari 12 mil dari pantai masing-masing negara, tujuannya yaitu untuk menghindari pelanggaran yang tidak disengaja melewati batas-batas maritim oleh nelayan nasional.⁵ Dalam Konvensi Pelengkap 1954 dari Deklarasi Kedaulatan zona maritim 200 mil, akan dilanjutkan dengan kesepakatan umum dalam pembelaan hukum dari prinsip

²International Boundary Study.Chile-Peru Boundary. No. 65 28 February 1966 .diakses dari <http://www.law.fsu.edu/library/collection/limitsinseas/ibs065.pdf> pada 2/4/2014

³John,Ronald Bruce St. 1994.Stalemate in the Atacama.IBRU Boundary and Security Bulletin. Diakses dari <<https://www.dur.ac.uk/ibru/publications/view/?id=30>>

⁴Memorial of The Government of Peru. International Court of Justice. Maritim Dispute (Peru v. Chile). Vol. 1. Hlm. 11-119. Diakses dari (www.icj-cij.org/docket/files/137/17186.pdf) pada 2/2/2014

⁵United States Department of State, Office of the Geographer, Limits in the Seas.No. 86 (Chile-Peru), 1979. Diakses dari <http://www.state.gov/documents/organization/58820.pdf> pada 4/2/14

kedaulatan atas zona maritim hingga jarak minimal 200 mil.

Baik Peru maupun Chili telah mengeluarkan Undang-Undang mengenai perairan mereka. Peru, pada tahun 1955, mengeluarkan Resolusi agung No. 23 mengenaikartografi dan geodesic yang terkait dengan zona martitim sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Agung 1947 dan Deklarasi Santiago 1952, dengan persyaratan tertentu yang terdiri atas: (1) Zona tersebut harus dibatasi pada laut oleh garis yang sejajar dengan pantai Peru dan pada jarak konstan dari 200 mil laut dari itu. (2) Sesuai dengan pasal IV Deklarasi Santiago, garis tersebut tidak boleh melampaui paralel yang sesuai pada titik dimana perbatasan Peru mencapai laut.⁶ Resolusi Agung 1955 ini diberikan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) oleh Menteri Luar Negeri Peru dalam catatan verbal pada 22 Agustus 1972, dan diterbitkan di *United Nations Legislatif Series* pada tahun 1974. Peru mengirimkan Resolusi Agung 1955 kepada PBB tanpa reservasi tentang ruang lingkup atau penerapan yang sedang berlangsung.⁷

Chili mengeluarkan Undang-Undang No. 18.565 amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berkaitan dengan ruang maritim Chili pada 13 Oktober 1986. Chili memasukkan zona maritim yang sesuai dengan UNCLOS dalam hukum nasionalnya. Dalam pasal 593 dari *Chilean Civil Code* 1855, diatur bahwa laut yang berdekatan dengan jarak 12 mil laut diukur

dari garis pangkal masing-masing yang akan merupakan laut territorial dan milik bangsa. Untuk tujuan yang berkaitan dengan pencegahan dan penghukuman, negara harus memiliki yurisdiksi atas ruang maritime, zona tambahan, yang akan memperpanjang hingga jarak 24 mil, diukur dengan jarak yang sama.⁸ Pasal 596 menyatakan laut yang berdekatan membentang hingga 200 mill laut dari garis pangkal darimana lebar laut territorial diukur ditetapkan sebagai zona ekonomi eksklusif. Batas-batas maritime sebagaimana dimaksud dalam pasal 593 dan 596 ini tidak akan mempengaruhi batas maritime yang sudah ada.⁹

Pada bulan Maret 1966, terjadi insiden di wilayah laut perbatasan, yaitu ketika Kapal perang angkatan laut Peru, *Diez Canseco*, merespon pelanggaran yang terjadi di batas laut Chili-Peru oleh dua kapal penangkap ikan Chili (*Mariette dan Angamos*) dengan menembakkan 16 tembakan peringatan dari kanon.¹⁰

Pada awal tahun 1968, dalam pertemuan subregional dalam kaitan dengan Kesepakatan Pasifik Selatan di Lima, pejabat Peru mengadakan pertemuan dengan pejabat departemen luar negeri Chili untuk diskusi informal berkaitan dengan gesekan yang timbul dari kegiatan kapal nelayan di pesisir. Setelah pertemuan itu Peru menulis kepada Chili pada tanggal 6 Februari 1968, menyatakan bahwa baik untuk negara untuk

⁶Corporacion de studios internacionales. *The Maritim Boundary Chile-Peru*. Hal. 14. Diakses dari <http://www.captura.uchile.cl/bitstream/handle/2250/17018/Espaliat_Cave_ing.pdf?sequence=1> pada 11 Juni 2014

⁷Counter-Memorial Of The Government Of Chile. International Court Of Justice. Maritim Dispute (Peru V. Chile). Hlm. 17 Diakses dari <www.MahkamahInternasional-cij.org/docket/files/137/17188.pdf>

⁸Law No. 18.565 amending the Civil Code with regard to maritime space, 13 October 1986(1). Diakses dari <www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/CHL_1986_18565.pdf> pada tanggal 13 Juni 2014

⁹*Ibid.*,

¹⁰Rejoinder of the Government of Chile. International Court of Justice. Maritim Dispute (Peru v. Chile) Vol. I. Hlm. 47-48. Diakses dari <www.MahkamahInternasional-cij.org/docket/files/137/17192.pdf>

melanjutkan membangun pos atau tanda-tanda dimensi dan terlihat pada jarak yang besar, pada titik dimana perbatasan bersama mencapai laut, dekat Penanda Batas No. 1.

Pada tanggal 8 Maret 1968, Chili menerima proposal ini dan ini adalah kesepakatan yang dicapai oleh para pihak. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah tentang operasi kapal nelayan Peru dan Chili ke pantai dengan mendirikan suar untuk mengidentifikasi lokasi batas tanah didekat pantai. Pertemuan delegasi Peru dan Chili diadakan pada 25 April 1968 di Arica. Delegasi memeriksa lokasi tanah yang relevan dan membuat "pandangan...dari laut". Pada hari berikutnya dokumen ditandatangani oleh kedua pihak mencatat proposal yang disetujui untuk pemerintahan masing-masing untuk instalasi dua penanda sinyal siang hari dan malam, dimana tanda depan ditempatkan di sekitar penanda batas No.1, di wilayah Peru; sedangkan tanda belakang akan ditempatkan di sekitar 1.800 meter dari tanda depan, kearah paralel perbatasan maritime, diwilayah Chili.¹¹

Kemudian pada tanggal 23 Juli 1968, kapal penangkap ikan Chili yang lain, Martin Pescador 2°, diserang oleh kapal patrol Peru, Atico, di daerah sebelah utara batas paralel. Pemilik kapal terluka oleh tembakan senjata api. Dalam catatan diplomatiknya kepada Chili, Peru menjelaskan bahwa garis paralel (dalam proses yang ditandai dengan kesejajaran mercusuar) merupakan batas yurisdiksi Chile dan garis pemisah zona maritim kedua negara. Atico sebagai kapal patrol telah memberikan peringatan kepada 20 kapal Chili yang melakukan kegiatan diwilayah itu, pemberitahuan dipatuhi oleh semua kapal kecuali Martin Pescador 2°. Sehingga

kapal patrol menembak tanpa tujuan untuk peringatan yang mengakibatkan pemilik kapal terluka tanpa disengaja.¹²

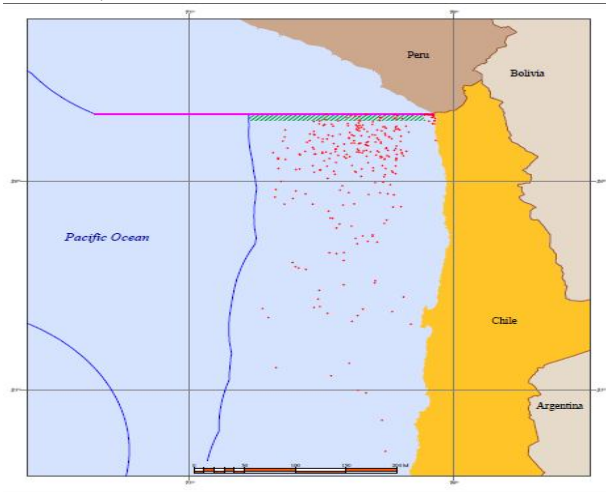
Sebagaimana praktek yang dilakukan oleh Peru, Chili juga telah memberlakukan batas maritime dengan menangkap kapal ilegal nelayan Peru yang terlibat dalam penangkapan ikan diperairan selatan batas politik internasional. Selama bertahun-tahun, pemerintah dan angkatan laut Chili telah menangkap banyak kapal Peru dan dalam beberapa kasus dituntut melakukan penangkapan ikan ilegal di perairan Chili. Setelah kesepakatan tentang peraturan izin untuk eksploitasi sumber daya Pasifik Selatan dibawah naungan CPPS (Komisi Tetap Pasifik Selatan), Chili mengatur penerbitan izin untuk kapal-kapal asing yang menangkap ikan diwilayah perairan Chili dan ketentuan bahwa kapal asing penangkap ikan yang tanpa izin akan dituntut. Dibawah rezim ini, kegiatan penangkapan ikan di laut territorial dan ZEE Chili memerlukan izin, dan bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi denda. Tindak pidana bukan hanya melanggar aturan lalu lintas di laut, melainkan juga kegiatan ilegal di laut territorial Chili. Data yang tersedia pada tahun 1984 dan 1994-2009, menunjukkan banyak kapal yang ditemukan di perairan Chili.¹³

¹¹ Memorial of The Government of Peru. *Op.cit.*, Hlm.152-153.

¹² Rejoinder of the Government of Chile. *Op.cit.*, Hlm. 158-159.

¹³ Counter-Memorial Of The Government Of Chile. Hlm. 221-224. Diakses dari <www.MahkamahInternasional-cij.org/docket/files/137/17188.pdf>

Gambar 1. Gambaran lokasi kapal Peru telah ditangkap oleh Chile karena melanggar batas maritim, 1984 dan 1994-2009



Sumber: Counter-Memorial Of The Government Of Chile.
<www.Mahkamah Internasional-cij.org/docket/files/137/17188.pdf>

Pembahasan

Baik Peru maupun Chili memiliki penafsiran yang berbeda mengenai perjanjian-perjanjian yang telah dilakukan sehingga sering terjadi gesekan antara kedua negara. Pada tahun 1982, Peru berusaha untuk menegosiasikan batas laut dengan Chili, namun Chili menolak dengan alasan perbatasan antara kedua negara telah ditentukan dalam perjanjian tahun 1952 dan 1954. Kemudian pada tanggal 23 Mei 1986, Peru secara resmi menyatakan ketidaksetujuannya terhadap Chili mengenai isu batas maritim untuk pertama kalinya. Duta Besar Peru untuk Chili, Juan Miguel Bakula mengadakan pertemuan dengan Kanselir Chili dan menjelaskan posisi Peru tentang masalah perbatasan maritime dengan menyertakan memorandum. Memorandum Bakula ini mengklaim bahwa 'formula' yang ditetapkan pada perjanjian Zona batas maritime khusus 'tidak lagi memadai untuk memenuhi kebutuhan keamanan' penandatanganan dan bahwa interpretasi

yang luas dapat mengakibatkan situasi tidak adil dan berisiko untuk Peru. Mengenai topik ini belum ada reaksi resmi dari pemerintah Chili.¹⁴ Chili hanya menanggapi dengan siaran pers dimana Chili menyatakan untuk melakukan studi pada subjek.

Pada tanggal 21 September 2000, sesuai dengan pasal 16 ayat 2; Pasal 75 ayat 2; dan Pasal 84 ayat 2 UNCLOS, pemerintah Chili menyerahkan kepada Sekretaris Jenderal PBB grafik yang menunjukkan garis dasar lurus dan normal, laut territorial, zona eksklusif, dan landas kontinen, serta daftar titik koordinat geografis yang ditentukan datum geodetic¹⁵, dan menyebutkan 18°21'00" Lintang Selatan sebagai batas maritime antara Peru dan Chili.

Oleh karena itu, tanggal 20 Oktober 2000, tanggal catatan yang ditujukan kepada pemerintah Chili, dianggap tanggal kritis dari sengketa maritime ini, karena ini konflik klaim atas batas maritime antara Peru dan Chili yang pertama maju. Pada 9 Januari 2001, Peru mengeluarkan pernyataan mengenai grafik yang diserahkan Chili kepada Sek-Jen PBB, bahwa Peru dan Chili tidak menyimpulkan perjanjian batas maritime yang spesifik sesuai dengan aturan hukum internasional yang relevan dan Peru

¹⁴Horna, Angel V. *Maritime Dispute (Peru v. Chile): Background and Preliminary Thoughts*. Diakses dari: <https://www.academia.edu/5818738/Maritime_Dispute_Peru_v._Chile_Background_and_Preliminary_Thoughts>

¹⁵Datum geodetik adalah parameter yang digunakan untuk mendefinisikan bentuk dan ukuran elipsoid referensi. Parameter-parameter ini selanjutnya digunakan untuk pendefinisian koordinat, serta kedudukan dan orientasinya dalam ruang di muka bumi. Setiap negara menggunakan suatu sistem Datum Geodetik yang masing-masing ditetapkan menjadi dasar acuan pemetaan nasionalnya.

tidak mengakui paralel sebagai batas maritime antara kedua negara.¹⁶

Kemudian upaya negosiasi kembali dilakukan oleh Peru, pada bulan Juni 2004, melalui nota diplomatik, mengusulkan dimulainya negosiasi perjanjian menetapkan batas maritim dibawah hukum internasional, yaitu dengan garis yang berjarak sama, dengan jangka waktu enam puluh hari untuk memulai negosiasi. Pemerintah Chili menanggapi catatan pada tanggal 10 September 2004, dan mengklaim bahwa, bagi Santiago, masalah perbatasan telah diselesaikan dengan perjanjian internasional yang disimpulkan pada tahun-tahun sebelumnya antara kedua negara.

Pada tanggal 1 November 2005, Pemerintah Peru menyampaikan nota diplomatik kepada Duta Besar Chili di Peru, menyampaikan sejumlah perbedaan pendapat yang dari penafsiran Chili terhadap Deklarasi Santiago dan Perjanjian 1954, menyinggung posisi persisten Peru dimana ada batas maritim ada antara kedua negara. Pada tanggal 3 November 2005, Parlemen Peru mengeluarkan UU No 28621 tentang *Peru Maritime Domain Baseline*. Tujuan UU ini adalah: (1) untuk menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 54 dari Konstitusi Peru; (2) untuk menetapkan secara akurat, untuk pertama kalinya, sejauh mana domain maritim Peru; dan (3) untuk atribut karakter perairan internal untuk perairan tertutup oleh garis pangkal lurus, mana yang berlaku.¹⁷ Pemerintah Chili menyatakan bahwa UU ini mempengaruhi kedaulatannya, dan sebagai reaksi, pada tanggal 19 Desember 2006, Chili mengusulkan untuk penciptaan hukum 'wilayah Arica-Parinacota' yang bertujuan

untuk mendirikan sebagai batas wilayah baru dengan Peru.

Menanggapi keberatan yang diberikan oleh Chili terhadap UU maritime domain ini, pada 29 Mei 2007, Peru menyatakan bahwa titik Concordia sesuai Perjanjian Lima 1929 menjadi pembatas antara Peru dan Chili, sedangkan Penanda Batas No. 1 bukan tapal batas. Peru menyatakan bahwa sengketa antara kedua Negara harus diselesaikan sesuai dengan hukum internasional.¹⁸

Pada tanggal 28 Juli 2007, Presiden Peru, Alan Garcia mengumumkan keputusan yang diambil oleh Pemerintah untuk mencari penyelesaian damai sengketa ini dengan membawa klaim ke Mahkamah Internasional. Presiden Garcia juga mengumumkan bahwa keputusan tersebut telah secara resmi dikomunikasikan kepada otoritas tertinggi di Chile. Pada tanggal 12 Agustus 2007, sesuai dengan Pasal 4 dan 5 UU No 28621, Peru mengesahkan grafik dari batas luar domain maritim nya (sektor selatan) dengan Keputusan Agung Nomor 047-2007-RE, menunjukkan ruang maritim yang berdekatan Chili sebagai daerah dalam sengketa (*area en controversia*) (lihat Gambar 2). Hal ini menunjukkan bahwa sejauh ini ada tumpang tindih zona maritim antara kedua negara. Hal ini juga penting untuk menggarisbawahi bahwa ini adalah pertama kalinya, setelah SK Agung Peru tahun 1947 yang mengklaim 200 mil laut dari domain maritim, seperti yang tercermin dalam grafik.¹⁹ Pemerintah Chili menyampaikan ketidak setujuannya terhadap

¹⁶Horna, Angel V.*op.cit.*,

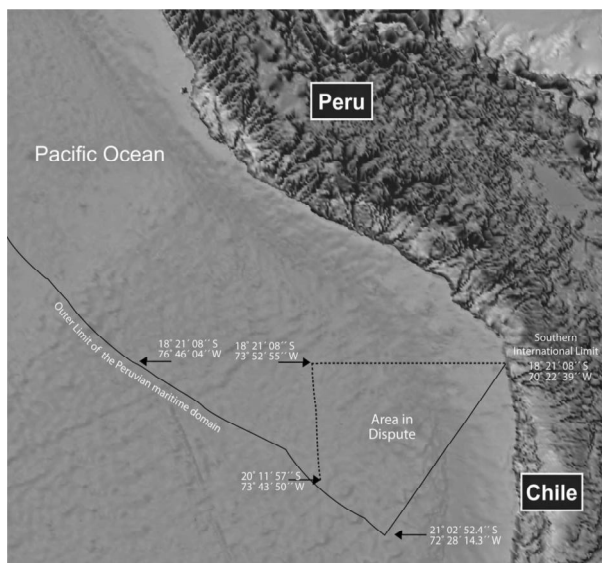
¹⁷*Ibid.*,

¹⁸ Law Of The Sea Bulletin. Peru. Response to the Objection by the Government of Chile to the Peruvian Maritime Domain Baselines Law..Hlm 36. Diakses dari <www.un.org/Depts/los/doalos_publications/LOSBulletins/bulletinpdf/bulletin65e.pdf>, pada tanggal 13 Juni 2014

¹⁹Horna, Angel V.*op.cit.*,

Keputusan Agung Peru tersebut karena peta tersebut menghubungkan Peru ke daerah maritim yang seharusnya tunduk pada kedaulatan dan hak berdaulat Chili, serta daerah yang berdekatan dengan laut bebas. Chili juga menegaskan akan terus melaksanakan semua hak yang sesuai dengan ruang yang berada dibawah kedaulatan dan yurisdiksi sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional.

Gambar 2. Wilayah Sengketa



Sumber: Horna, Angel V. *Maritime Dispute (Peru v. Chile): Background and Preliminary Thoughts*. Diakses dari: <https://www.academia.edu/5818738/Maritime_Dispute_Peru_v._Chile_Background_and_Preliminary_Thoughts>

Negosiasi antara kedua Negara tidak berhasil mengenai penentuan batas maritim, ini dikarenakan kedua Negara memiliki kepentingan terhadap wilayah sengketa. Wilayah maritim yang disengketakan ini merupakan daerah yang kaya akan sumber daya perikanan. Ini didukung oleh arus Humbolt yang mengalir antara laut Chili dan Peru, Pasifik Tenggara (Lihat Gambar 3).

Kehidupan di arus laut Humbolt ini sangat produktif dalam hal keanekaragaman hayati dan biomass secara keseluruhan. Sekitar 18-20% ikan tangkapan di dunia berasal dari ekosistem arus Humbolt ini, dengan spesies tertentu seperti ikan teri, sarden serta ikan paus juga penting namun sekarang sudah dilarang. Akses ke sumber daya ikan di daerah ini penting untuk perekonomian Peru secara keseluruhan, dan khususnya kesejahteraan ekonomi penduduk Peru yang tinggal di daerah pesisir, dimana penangkapan ikan merupakan segmen utama perekonomian baik dalam hal pekerjaan maupun pangan. Peru merupakan produsen ikan teri terbesar di dunia, yang kemudian diikuti oleh Chili.²⁰ Selain industri penangkapan ikan, ada kegiatan artisanal memancing yang sebagian besar beroperasi di Tacna dan Moquegua. Oleh karena itu sangat penting bagi masyarakat setempat dan negara untuk dapat mengakses ke perairan lepas pantai selatan Peru. Namun, akses ini telah terhambat karena tidak adanya batas laut dengan Chili dan untuk menghindari insiden dan bentrokan antara kedua negara, kegiatan nelayan Peru telah dibatasi oleh perjanjian zona khusus pada tahun 1954.

²⁰La disputa marítima entre Perú y Chile ilegal tribunal de la ONU. Diakses dari <http://internacional.elpais.com/internacional/2014/01/21/actualidad/1390319943_792067.html>

Gambar 2.6 Arus Laut di Pasifik Tenggara



Sumber: Giwa Regional Assessment 64 Humboldt Current, Regional Definition. Diakses dari http://www.unep.org/dewa/giwa/areas/reports/r64/regional_definition_giwa_r64.pdf

Dalam masalah ini Peru memilih cara penyelesaian sengketa perbatasan laut dengan Chili secara damai melalui jalur hukum dengan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Internasional. Sebagaimana tercantum dalam Statuta Pasal 38 Mahkamah Internasional, untuk memutuskan sesuai dengan hukum internasional sengketa-sengketa yang diajukan kepadanya. Hasil putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional bersifat mengikat para pihak yang bersengketa dan bersifat final, tidak dapat diadakan banding. Sejak berdiri tahun 1946 di Den Haag, Mahkamah Internasional telah mengeluarkan banyak putusan tentang berbagai topik seperti perbatasan darat, batas laut, kedaulatan territorial, dan penggunaan non kekerasan.

1. Pengajuan Sengketa

Pada 16 Januari 2008, Peru mengajukan aplikasi kepada Mahkamah Internasional untuk menentukan arah dari batas antara zona maritimnya dengan Chili sesuai dengan hukum internasional dan untuk memutuskan secara hukum dan menyatakan bahwa Peru memiliki hak

berdaulat eksklusif maritim daerah yang terletak dalam batas-batas 200 mil laut dari pantai, tetapi di luar zona ekonomi eksklusif Chile atau landas kontinen.²¹

Yurisdiksi Mahkamah dalam hal ini didasarkan pada *American Treaty of Pacific on Settlement* (Pakta Bogota) Pasal XXXI 30 April 1948. Peru dan Chile merupakan Pihak dari Pakta Bogota. Peru meratifikasinya pada tanggal 28 Februari 1967 dan Chile meratifikasinya pada 21 Agustus 1967. Tidak ada reservasi yang berlaku pada tanggal ini telah dibuat oleh setiap Pihak di bawah Pakta. Peru memberitahu Sekretariat Jenderal Organisasi Negara-negara Amerika dari penarikan pada awal reservasi tanggal 27 Februari 2006. Pasal XXXI Pakta Bogota merupakan dasar yang memadai bagi yurisdiksi dalam kasus sengketa hukum antara dua Negara Pihak.²²

Peru meminta pengadilan untuk menentukan batas zona maritime antara kedua negara sesuai dengan hukum internasional dan untuk memutuskan secara hukum menyatakan bahwa Peru menguasai kedaulatan eksklusif di area laut dalam batas 200 mil dari pantainya dan diluar zona ekonomi eksklusif atau landas kontinen Chili.²³

2. Pembelaan Tertulis

Sesuai dengan tata tertib tertanggal 31 Maret 2008, Pengadilan menetapkan 20 Maret 2009 sebagai batas waktu untuk menyerahkan *Memorial* Republik Peru dan 9 Maret 2010 penyerahan *Counter-*

²¹Grbec, Mitja & Payliha, Marko. 2014. The International Court of Justice and The Peru-Chile Maritime Case. Diakses dari < <http://www.e-ir.info/2014/04/21/the-international-court-of-justice-and-the-peru-chile-maritime-case/> > pada tanggal 11 Juni 2014

²² Memorial of The Government of Peru. *Op.cit.*,

²³ Application Instituting Proceedings. *Op.cit.*, hlm. 6

Memorial Chili.²⁴ Kedua negara mengajukan *Memorial* dan *Counter-Memorial* dalam batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya, setelah bertemu dengan Perwakilan dari masing-masing pihak, Mahkamah memutuskan bahwa Peru dapat mengajukan *Reply* pada atau sebelum tanggal 9 November 2010 dan *Rejoinder* Chili pada atau sebelum 11 Juli 2011. Masing-masing pihak mengajukan dokumen dalam jangka jatuh tempo.²⁵

Dalam pembelaannya, antara Peru dan Chili terdapat perbedaan penafsiran mengenai perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua pihak pada tahun-tahun sebelumnya. Berikut adalah pembelaan dari masing-masing pihak:

1. Peru

Dalam Deklarasi Santiago, pasal IV tertulis mengenai batas maritim antara para pihak sepakat mengenai zona maritim tak kurang dari 200 mil. Sesuai pasal tersebut, metode yang akan diterapkan secara eksklusif ke zona maritim pulau adalah dari titik paralel geografis dimana batas tanah masing-masing negara mencapai laut. Peru menilai bahwa pasal IV tidak berlaku untuk situasi hubungan Peru-Chili. Akibatnya, Deklarasi Santiago tidak termasuk kesepakatan mengenai batas antara zona maritim umum dari negara-negara penandatangan.²⁶

Special Maritim Frontier Zone 1954 Agreement, menurut Peru bukan merupakan perjanjian batas maritim. Dalam artikel

²⁴ Memorial of The Government of Peru. *Op.cit*

²⁵ Corporacion de studios internacionales. The Maritime Boundary Chile-Peru. *Op.cit.*, Hal. 24-25.

²⁶ Maritim Delimitation between Peru and Chile. Diakses dari <http://www.embaperu.org.au/embassy/pdfs/Maritim_Delimitation_Peru_Chile.pdf> pada 13 Juni 2014

pertama menentukan bahwa zona khusus dibentuk pada jarak 12 mil di kedua sisi paralel yang merupakan batas laut antara dua negara. Ungkapan batas maritim dalam pasal tersebut tidak bisa dan tidak boleh ditafsirkan tetapi dalam fungsi garis diselenggarakan dengan tujuan eksklusif orientasi kapal penangkap ikan. Dapat dengan mudah direalisasikan, efek dari perjanjian ini terbatas pada lingkup nelayan pasal 4 perjanjian tambahan 1954 yang menetapkan bahwa semua ketentuan perjanjian ini dianggap menjadi bagian integral dan pelengkap, bukan untuk membatalkan, resolusi dan keputusan-keputusan yang diterapkan di konferensi Santiago 1952. Peru meratifikasi Perjanjian 1954 pada tanggal 6 Mei 1955, sedangkan Chili meratifikasinya pada tanggal 16 Agustus 1967 dan empat puluh tahun kemudian pada tanggal 24 Agustus 2004 secara sepihak terdaftar di PBB, menangani yang tidak sesuai dengan batas-batas perjanjian.²⁷

2. Chili

Bagi Chili, Deklarasi Santiago menetapkan kewajiban hukum yang mengikat. Hal ini dinyatakan dalam Pasal II, yaitu: "Pemerintah Chili, ekuador dan Peru menyatakan sebagai norma kebijakan maritim internasional mereka bahwa mereka masing-masing memiliki kedaulatan eksklusif dan yurisdiksi atas laut disepanjang pantai negara masing-masing untuk jarak minimal 200 mil laut dari pantai." Ketentuan ini berkaitan dengan pemeliharaan kebijakan maritim internasional negara pihak tidak membuat kewajiban berkurang. Selanjutnya Pasal III menyatakan bahwa kedaulatan eksklusif dan yurisdiksi atas zona maritim juga harus mencakup kedaulatan eksklusif dan

²⁷ *Ibid.*,

yurisdiksi atas dasar laut dan tanah didalamnya. Ini menyatakan hak hukum yang berkaitan dengan wilayah maritime termasuk landas kontinen.²⁸

Deklarasi Santiago memuat prinsip-prinsip, dan dipertimbangkan selanjutnya, perjanjian lebih spesifik dalam pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip-prinsip tersebut, sebagai berikut:

1. Dua instrument yang ditandatangani pada tahun 1954 dan 1955, yang berkaitan dengan penerbitan izin untuk eksploitasi sumber daya maritime (baik yang hidup maupun yang tidak hidup) di zona maritime Chili, ekuador, dan Peru;
2. Perjanjian berkaitan dengan ukuran pengawasan dan pengendalian zona maritim negara-negara penandatangan pada 1954;
3. Perjanjian berkaitan dengan Zona Batas Maritim Khusus 1954, menciptakan zona toleransi di kedua sisi batas-batas maritim yang sudah dipisahkan dalam Deklarasi Santiago.²⁹

3. Presentasi Pembelaan

Pada tanggal 22 Maret 2012, Pengadilan menetapkan tanggal bagi presentasi pembelaan yang akan berlangsung dari 03-14 Desember 2012. Pengadilan kemudian akan membahas dan memutuskan.³⁰

4. Keputusan Mahkamah

A. Penilaian Mahkamah Internasional

²⁸Rejoinder of the Government of Chile.*Op.cit.*, Hlm. 47-48.

²⁹Rejoinder of the Government of Chile.*Op.cit.* hlm. 49-50

³⁰*Ibid.*,

Dalam *Press release* yang dikeluarkan pada tanggal 27 Januari 2014,³¹ Penilaian Mahkamah Internasional terhadap sengketa ini dapat dilihat dari beberapa poin, yaitu:

1. Apakah ada batas maritim disepakati

Dalam Proklamasi 1947, Chili dan Peru secara sepihak memproklamasikan hak maritim tertentu membentang 200 mil laut dari pantai masing-masing. Memperhatikan bahwa para Pihak sepakat Proklamasi ini tidak membentuk batas maritim internasional antara kedua negara, Mahkamah menilai bahwa bahasa instrumen ini, serta sifatnya yang sementara, menghalangi interpretasi mereka yang mencerminkan pemahaman bersama para Pihak tentang delimitasi maritim. Mahkamah kemudian menganalisis Deklarasi Santiago 1952, dan menemukan bahwa Deklarasi Santiago 1952 adalah perjanjian internasional. Namun, penetapan batas maritim dalam Deklarasi ini hanya mengenai batas-batas zona maritim antarakepulauan dan zona yang dihasilkan oleh pantai benua yang berbatasan zona maritim seperti kepulauan. Ini tidak membentuk batas lateral maritim antara Peru dan Chile sepanjang paralel lintang ke Samudera Pasifik dari ujung arah laut dari batas tanah mereka.

Perjanjian zona batas maritim khusus 1954, menetapkan zona toleransi mulai jarak 12 mil dari pantai yang dimaksudkan untuk menghindari gesekan antara kedua negara yang bersangkutan. Pengadilan menemukan bahwa bahwa Perjanjian ini tidak menunjukkan kapan dan dengan cara apa

³¹Maritime Dispute (Peru v. Chile) The Court determines the course of the single maritime boundary between Peru and Chile. Diakses dari <www.icj-cij.org/docket/files/137/17928.pdf> pada 16 Juni 2014

batas yang disepakati. Perjanjian ini tidak memberikan indikasi sifat batas maritim. Juga tidak menunjukkan luasnya, kecuali bahwa ketentuan-ketentuannya membuat jelas bahwa batas laut melampaui 12 mil laut dari pantai.

2. Sifat batas maritim yang disepakati

Mahkamah kemudian beralih ke pertanyaan tentang sifat batas maritim yang disepakati, yaitu, apakah itu batas laut tunggal yang berlaku untuk kolom air, dasar laut dan tanah di bawahnya, atau batas hanya berlaku untuk kolom air. Menunjukkan bahwa ada perjanjian diam-diam dari Para Pihak yang harus dipahami dalam konteks Proklamasi 1947 dan Deklarasi Santiago 1952, yang menyatakan klaim ke dasar laut dan perairan di atas dasar laut dan sumber daya mereka tanpa adanya gambaran dari para pihak mengenai perbedaan antara ruang-ruang, Mahkamah menyimpulkan bahwa batas adalah semua tujuan.

3. Tingkat batas maritim yang disepakati

Dalam rangka untuk menentukan sejauh mana batas maritim yang disepakati, Mahkamah terlebih dahulu meneliti praktek yang relevan dari Para Pihak pada awal dan pertengahan 1950-an, lebih khusus potensi perikanan dan aktivitas. Mengamati bahwa informasi menunjukkan spesies ikan yang diambil di awal 1950-an pada umumnya dapat ditemukan dalam jarak 60 mil laut dari pantai dan aktivitas maritim utama pada waktu itu adalah memancing yang dilakukan oleh kapal-kapal kecil. Namun ini tak dapat menjadi penentu tingkat batas.

Atas dasar kegiatan memancing para Pihak di awal 1950-an, yang dilakukan hingga jarak sekitar 60 mil laut dari pelabuhan-pelabuhan utama daerah, praktek

yang relevan dari Negara lain dan pekerjaan dari Komisi Hukum Internasional Hukum Laut pada waktu itu, Mahkamah berpandangan bahwa bukti yang dimiliki tidak memungkinkan untuk menyimpulkan bahwa batas laut yang disepakati bersama paralel melampaui 80 mil laut dari titik awalnya.

Dalam kesimpulan sementara, Pengadilan kemudian memeriksa unsur lanjut praktek, untuk sebagian besar setelah 1954, yang mungkin berkaitan dengan masalah tingkat batas maritim yang disepakati. Ini mempertimbangkan bahwa unsur-unsur ini tidak mengarah untuk mengubah posisinya, namun dapat mendukung pandangan para pihak. Oleh karena itu, berdasarkan penilaian keseluruhan dari bukti yang relevan, Mahkamah berkesimpulan bahwa batas maritim disepakati antara Pihak diperpanjang hingga jarak 80 mil laut di sepanjang paralel dari awal-titik.

4. Titik awal dari batas laut yang disepakati

Dalam rangka untuk menentukan titik awal dari batas maritim, Mahkamah berpandangan bahwa pengaturan mercusuar 1968-1969 menjadi bukti kuat bahwa batas laut yang disepakati mengikuti paralel yang melewati Penanda Batas No. 1. Mahkamah menyimpulkan bahwa titik awal dari batas maritim antara Para Pihak adalah persimpangan paralel lintang lewat melalui Penanda Batas No. 1 dengan garis air rendah.

5. Jalannya batas maritim dari Point A

Setelah menyimpulkan bahwa batas maritim tunggal yang disepakati ada antara Para Pihak dan bahwa batas yang dimulai di persimpangan paralel lintang melewati Penanda Batas No. 1 dengan garis air rendah dan berlanjut sejauh 80 mil laut di sepanjang

paralel itu, Mahkamah mengubah penentuan batas maritim dari titik itu.

Untuk mempengaruhi delimitasi, Mahkamah menerapkan tiga tahap metodologi yang biasanya digunakan, yaitu:

- Tahap pertama, Mahkamah membangun garis *equidistance* sementara dimulai pada titik akhir dari batas maritim yang sudah ada (titik A). Garis *equidistance* sementara sehingga dibangun berjalan di arah selatan-barat secara umum, hampir dalam garis lurus, yang mencerminkan karakter kelancaran dua pantai, hingga mencapai batas 200 mil laut yang diukur dari garis pantai Chili (Titik B). Arah laut dari titik ini 200 mil laut dari pantai proyeksi Para Pihak tidak lagi tumpang tindih.

Mahkamah menemukan bahwa bahwa garis batas yang disepakati sepanjang paralel lintang berakhir pada 80 mil laut dari pantai dan yang telah memutuskan bahwa, di luar titik akhir dari batas yang telah disepakati, maka akan dilanjutkan dengan batas dari hak maritim tumpang tindih para Pihak dengan menggambar garis *equidistance*. Pengadilan kemudian mengamati bahwa, dari Point B, batas 200 mil laut dari hak maritim Chile berjalan ke arah selatan pada umumnya. Segmen terakhir dari hasil perbatasan laut di sepanjang batas itu dari Point B ke Point C, di mana batas-batas 200 mil laut dari Para Pihak hak maritim berpotongan.

- Tahap kedua, menganggap apakah ada keadaan yang relevan yang mungkin membutuhkan

penyesuaian garis untuk mencapai hasil yang adil. Namun Mahkamah menilai bahwa tidak ada keadaan yang relevan untuk penyesuaian garis *equidistance* sementara.

- Tahap ketiga, Pengadilan melakukan tes *disproporsionalitas* di mana Mahkamah menilai apakah efek garis, yang telah disesuaikan sedemikian rupa sehingga Para Pihak yang bersangkutan masing-masing berbagi area relevan yang secara nyata proporsional dengan panjang pantai relevan mereka. Mahkamah berpandangan bahwa tidak ada *disproporsi signifikan* jelas, seperti akan mempertanyakan sifat adil dari garis *equidistance* sementara.

B. Hasil Putusan Mahkamah Internasional

Sesuai Pasal 55 Statuta Mahkamah semua persoalan akan diputuskan melalui suara terbanyak dari hakim yang hadir. Dalam Penghakiman, yang bersifat final, tanpa banding dan mengikat para Pihak, Pengadilan³²

1. Memutuskan, oleh lima belas orang banding satu, bahwa titik awal dari batas maritim tunggal delimitasi wilayah maritim masing-masing antara Republik Peru dan Republik Chile adalah persimpangan paralel lintang lewat melalui Boundary Marker No. 1 dengan garis air rendah;
2. Memutuskan, oleh lima belas orang banding satu, bahwa segmen awal

³²Maritime Dispute (Peru v. Chile) The Court determines the course of the single maritime boundary between Peru and Chile. Diakses dari www.icj-cij.org/docket/files/137/17928.pdf pada 16 Juni 2014

dari batas laut tunggal mengikuti paralel lintang melewati Penanda Batas No. 1 ke arah barat;

3. Memutuskan, oleh sepuluh orang banding enam, segmen awal ini berjalan sampai ke titik (titik A) yang berada pada jarak 80 mil laut dari titik awal dari batas maritim tunggal;
4. Memutuskan, oleh sepuluh orang dengan enam, bahwa dari Point A, batas maritim tunggal akan terus ke selatan-barat sepanjang garis berjarak sama dari pantai Republik Peru dan Republik Chile, yang diukur dari titik itu, sampai persimpangan (pada titik B) dengan batas 200 mil laut diukur dari garis pangkal dari mana laut teritorial Republik Chile diukur. Dari titik B, batas maritim tunggal akan terus ke selatan sepanjang batas itu hingga mencapai titik persimpangan (Titik C) dari batas 200 mil laut diukur dari garis pangkal dari mana laut teritorial Republik Peru dan Republik Chile, masing-masing, diukur;
5. Memutuskan, oleh lima belas orang banding satu, yang, untuk alasan yang diberikan dalam ayat 189 (dari Pengadilan ini), tidak perlu untuk memutuskan pengajuan final kedua Republik Peru.

Kesimpulan dari penilaian Mahkamah di atas yaitu bahwa batas maritim antara Para Pihak dimulai di persimpangan paralel lintang lewat melalui Boundary Marker No 1 dengan garis air rendah, dan meluas untuk 80 mil laut sepanjang yang paralel lintang ke Point A. Dari ini titik, batas maritim berjalan sepanjang garis equidistance ke Point B, dan kemudian sepanjang batas 200 mil laut

diukur dari garis pangkal Chili ke Point C. (Lihat Gambar 4.2)

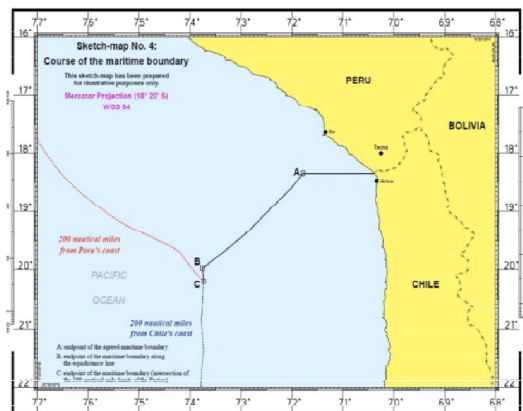
Mahkamah telah menentukan jalannya batas maritim antara Para Pihak tanpa menentukan tepat koordinat geografis. Ini mengingatkan bahwa belum diminta untuk melakukannya dalam pengiriman akhir Pihak. Oleh karena itu, Mahkamah mengharapkan bahwa Para Pihak akan menentukan ini koordinat sesuai dengan Putusan, dalam semangat bertetangga yang baik.

Pembacaan putusan dilakukan pada tanggal 27 Januari 2014 oleh Ketua Pengadilan, Hakim Peter Tomka, pada duduk publik yang akan disiarkan secara langsung oleh televisi nasional dan akan bersamaan ditafsirkan ke dalam bahasa Spanyol. Peru dan Chili menyatakan akan mematuhi apapun hasil dari putusan Mahkamah Internasional mengenai sengketa maritime mereka.³³

Resolusi damai dari batas sengketa maritim ini harus disambut baik, terutama mengingat bahwa asal-usulnya dimulai melalui permusuhan dan penggunaan kekuatan. Tampaknya jelas bahwa Mahkamah mencapai kompromi yang masuk akal antara posisi absolut yang telah diinginkan oleh Peru dan Chili.

³³Antaranews.Peru-Chile akan hormati putusan Mahkamah soal sengketa maritime. Diakses dari <<http://www.antaranews.com/berita/372964/peru-chile-akan-hormati-putusan-mahkamah-soal-sengketa-maritim>> pada 11 Juni 2014

Gambar 4.1 Peta batas maritime Putusan Mahkamah Internasional



Sumber: Grbec, Mitja & Payliha, Marko. 2014. The International Court of Justice and The Peru–Chile Maritime Case. Diakses dari <<http://www.e-ir.info/2014/04/21/the-international-court-of-justice-and-the-peru-chile-maritime-case/>> pada tanggal 11 Juni 2014

Chili memiliki batas lateral untuk 80 nm dan beberapa perikanan terkaya di wilayah klaim tumpang tindih. Peru memiliki batas berjarak sama dari titik itu ke 200 nm yang memberikan sekitar 21.000 km² dari 38.000 km² yang disengketakan. Dengan demikian, kedua belah pihak dapat mengklaim kemenangansampai batas tertentu. Putusan secara umum melekat pada proposisi bahwa delimitasi batas maritim merupakan suatu solusi yang adil. Pengadilan dalam putusannya secara proaktif dalam mencapai suatu hasil yang dimohonkan tanpa berpihak.

Simpulan

Dari penjelasan diatas, dapat kita ketahui yang menjadi alasan Peru mengupayakan penyelesaian sengketa perbatasan lautnya dengan Chili melalui Mahkamah Internasional. Alasannya ialah karena Mahkamah Internasional memutuskan sengketa-sengketa yang diajukan kepadanya sesuai dengan hukum

internasional, hasil putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional bersifat mengikat para pihak yang bersengketa, putusan Mahkamah yang bersifat final dan tidak dapat diadakan banding.

Setelah aplikasi Peru disampaikan, Mahkamah memberikan kesempatan untuk mengajukan pembelaan kepada pihak yang bersengketa. Mahkamah telah menentukan jalannya batas maritim antara para pihak tanpa menentukan kordinat geografis yang tepat karena belum diminta untuk melakukannya. Pada tanggal 27 Januari 2014, Mahkamah secara resmi mengeluarkan putusan mengenai sengketa ini. Kedua belah pihak menyatakan bahwa akan mematuhi putusan dari Mahkamah Internasional. Dari hasil putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah, kedua belah pihak dapat mengklaim kemenangansampai batas tertentu. Putusan secara umum melekat pada proposisi bahwa delimitasi batas maritim merupakan suatu solusi yang adil. Pengadilan dalam putusannya secara proaktif dalam mencapai suatu hasil yang dimohonkan tanpa berpihak. Disini dapat disimpulkan bahwa Mahkamah sebagai badan peradilan internasional dapat memberikan jaminan dalam menyelesaikan sengketa internasional secara adil dan hasil putusannya memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Putusan Mahkamah ini final dan tanpa banding bagi pihak yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

Jurnal

Lantang, Imanuella. 2013. *Penerapan Jus Cogens Terhadap Praktik Imunitas Negara (Studi Kasus Putusan Iej Dalam Kasus Jerman Lawan Italia)*. Lex Crimen, 2(1). Diakses Dari <<http://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index>>

[Php/Lexcrimen/Article/View/1008/821.12/6/14](#)> Pada Tanggal 12/06/14

Dokumen

Counter-Memorial Of The Government Of Chile. International Court Of Justice. Maritim Dispute (Peru V. Chile). Diakses dari <www.icj-cij.org/docket/files/137/17188.pdf>

Law No. 18.565 amending the Civil Code with regard to maritime space, 13 October 1986(1). Diakses dari <www.un.org/Depts/los/legislation_and_treaties/pdf_files/chl_1986_18565.pdf> pada tanggal 13 Juni 2014

Maritime Dispute (Peru v. Chile) The Court determines the course of the single maritime boundary between Peru and Chile. Diakses dari <www.icj-cij.org/docket/files/137/17928.pdf> pada 16 Juni 2014

Memorial of The Government of Peru. International Court of Justice. Maritim Dispute (Peru v. Chile). Vol. 1. Diakses dari (www.icj-cij.org/docket/files/137/17186.pdf) pada 2/2/2014

Ministerio de Relaciones Exteriores. Case concerning the Maritime Delimitation between Peru and Chile before the International Court of Justice. Diakses dari <http://www.rree.gob.pe/noticias/Documents/triptico_informativo_peru_1_a_haya_version_ingles.pdf> pada tanggal 2 Februari 2014

International Boundary Study. Chile-Peru Boundary. No. 65 28 February 1966 .diakses dari <http://www.law.fsu.edu/library/collection/limitsinseas/ibs065.pdf> pada 2/4/2014

Rejoinder of the Government of Chile. International Court of Justice. Maritim Dispute (Peru v. Chile) Vol. I. Diakses dari <www.icj-cij.org/docket/files/137/17192.pdf>

United States Department of State, Office of the Geographer, Limits in the Seas. No. 86 (Chile-Peru), 1979. Diakses dari <http://www.state.gov/documents/organization/58820.pdf> pada 4/2/14

Website

Antaranews. Peru-Chile akan hormati putusan Mahkamah soal sengketa maritime. Diakses dari <<http://www.antaranews.com/berita/372964/peru-chile-akan-hormati-putusan-mahkamah-soal-sengketa-maritim>> pada 11 Juni 2014

Corporacion de studios internacionales. The Maritim Boundary Chile-Peru. Diakses dari <http://www.captura.uchile.cl/bitstream/handle/2250/17018/Espaliat_Cave_ing.pdf?sequence=1> pada 11 Juni 2014

Giwa Regional Assessment 64 Humboldt Current, Regional Defenition. Diakses dari <http://www.unep.org/dewa/giwa/areas/reports/r64/regional_definition_giwa_r64.pdf>

Grbec, Mitja & Payliha, Marko. 2014. The International Court of Justice and The Peru-Chile Maritime Case. Diakses dari < <http://www.e-ir.info/2014/04/21/the-international-court-of-justice-and-the-peru-chile-maritime-case/> > pada tanggal 11 Juni 2014

Horna, Angel V. *Maritime Dispute (Peru v. Chile): Background and Preliminary Thoughts*. Diakses

dari:<https://www.academia.edu/5818738/Maritime_Dispute_Peru_v._Chile_Background_and_Preliminary_Thoughts>

La disputa marítima entre Perú y Chile llega a tribunal de la ONU. Diakses dari

<http://internacional.elpais.com/internacional/2014/01/21/actualidad/1390319943_792067.html>

Maritim Delimitation between Peru and Chile. Diakses dari

<http://www.embaperu.org.au/embassy/pdfs/Maritim_Delimitation_Peru_Chile.pdf> pada 13 Juni 2014

Artikel

John, Ronald Bruce St. 1994. Stalemate in the Atacama. IBRU Boundary and Security Bulletin. Diakses dari <<https://www.dur.ac.uk/ibru/publications/view/?id=30>>